

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN
(KANTOR WALIKOTA MEDAN)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh

Nama : Fera Afifah

NPM : 1605170224

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 07 Mei 2021, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : FERA AFIFAH
NPM : 1605170224
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS FAKTO-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN
(KANTOR WALI KOTA MEDAN)

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(NOVIEN RIALDY, SE., MM)

Penguji II

(SITI AISYAH SIREGAR, SE., M.Si)

Pembimbing

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si., AK., CA)

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA MAHASISWA : FERA AFIFAH
NPM : 1605170224
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
JUDUL SKRIPSI : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan.

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, 27 April 2021

Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, AK, CA)

Diketahui / Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Fitriani Saragih S.E, M.Si)



(Januri S.E, M.M, M.Si)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : FERA AFIFAH

N.P.M : 1605170224

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**Judul Skripsi : ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENYERAPAN ANGGARAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN
(KANTOR WALIKOTA MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data-data dalam skripsi atau data-data lainnya adalah benar dari Perbankan Syariah kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juni 2021
Saya yang menyatakan,



FERA AFIFAH

***Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran
Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan
(Kantor Walikota Medan)***

Fera Afifah

1605170224

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Fera.afifah031@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan. Jenis penelitian yang dilakukan adalah asosiatif yang bersifat kausal. Metode penelitian menggunakan metode survey. Populasi dalam penelitian ini adalah yang ada di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang berjumlah 32 SKPD. Seluruh populasi digunakan sebagai sampel. Data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perencanaan, administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen pengadaan, dan pengajuan ganti uang persediaan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan. Secara parsial variabel perencanaan, kompetensi sumber daya manusia, dan ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan, sedangkan administrasi dan dokumen pengadaan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.

Kata Kunci: Penyerapan Anggaran, Perencanaan, Administrasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dokumen Pengadaan, Ganti Uang Persediaan.

***Analysis of Factors Affecting Budget Absorption in Regional Government Work
Units of Medan City (Medan Mayor's Office)***

Fera Afifah

1605170224

Faculty Of Economics and Business

Fera.afifah031@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that affect the absorption of the budget of the Regional Apparatus Work Unit in Medan City. The type of research conducted is causal associative. The research method uses a survey method. The population in this study were all SKPD in the Medan City Government, which amounted to 32 SKPD. The entire population is used as a sample. The data were processed using multiple regression analysis. The results of this study prove that planning, administration, competence of human resources, procurement documents, and submission of compensation for supplies simultaneously have a significant positive effect on the absorption of the SKPD budget in Medan City. Partially, the variables of planning, human resource competence, and supply reimbursement have a positive and significant effect on the absorption of the SKPD budget in Medan City, while administration and procurement documents have a positive but not significant effect on the absorption of the SKPD budget in Medan City.

Keywords: Budget Absorption, Planning, Administration, Human Resources, Procurement Documentation, Supply Reimbursement.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan (Kantor Walikota Medan)**”. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Dalam hal ini saya mengucapkan terimakasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan keberkahan-Nya berupa kesehatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik serta Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya keilmuan melalui AL-Qur’an. Dan terimakasih kepada kedua orangtuaku Ayahanda Zainal Amri dan Ibunda Siti Syarah tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak H Januri, SE, MM, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Ade Gunawan S E, M Si, selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Fitriani Saragih , S E, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, AK, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran yang telah memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya staf pengajar pada jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Rekan-rekan satu angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Medan, Juni 2021
Penulis

Fera Afifah

DAFTAR ISI

Halaman

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR..... x

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 6

1.3 Batasan Masalah 6

1.4 Rumusan Masalah 6

1.5 Tujuan Penelitian 7

1.6 Manfaat Penelitian 7

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori 9

2.1.1 Teori Stakeholder 9

2.1.2 Anggaran dan Penggaran 10

2.1.3 Penyerapan Anggaran	11
2.1.4 Sistem Penggaran di Indonesia	13
2.1.5 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran	14
2.2 Kerangka Konseptual	20
2.3 Hipotesis	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	27
3.2 Definisi Operasional	27
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.4 Teknik Pengambilan Sampel	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data	43
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	43
4.1.2 Deskripsi Responden	43
4.1.3 Statistik Deskripsi Frekuensi	46
4.2 Analisis Data	52
4.2.1 Uji Asumsi Data	52
4.2.2 Hasil Regresi Linier Berganda	54
4.2.3 Pengujian Hipotesis	59
4.2.4 Pembahasan Hasil Penelitian	60

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	67
5.3 Keterbatasan Penelitian	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2017	4
Tabel 1.2 Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2018	4
Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2019	5
Tabel 3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	30
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	31
Tabel 3.3 Uji Validitas	34
Tabel 3.4 Uji Reliabilitas	37
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden	44
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Responden	44
Tabel 4.3 Latar Belakang Pendidikan Responden	45
Tabel 4.4 Intensitas Kursus/Diklat/Bimtek di Bidang Akuntansi atau Pengelolaan Keuangan Daerah ataupun Penyusunan Laporan Keuangan yang Pernah diikuti Responden	45
Tabel 4.5 Persepsi responden terhadap perencanaan yang di jalankan di SKPD responden	46
Tabel 4.6 Persepsi responden terhadap proses Administrasi yang di laksanakan di SKPD responden	47
Tabel 4.7 Persepsi responden terhadap Kompetensi SDM yang ada di SKPD responden	48
Tabel 4.8 Persepsi responden terhadap pelaksanaan proses Penyusunan dokumen keuangan yang dijalankan di SKPD responden	49
Tabel 4.9 Persepsi responden terhadap proses pengajuan Ganti Uang Persediaan di SKPD responden	50
Tabel 4.10 Persepsi responden terhadap adanya penyerapan anggaran di SKPD responden	51
Tabel 4.11 Uji Normalitas.....	52
Tabel 4.12 Uji Multikolonieritas.....	53
Tabel 4.13 Uji Heteroskedastisitas.....	54

Tabel 4.14 Regresi Linier Berganda	55
Tabel 4.15 Koefisien Determinasi (R^2).....	57
Tabel 4.16 Uji Statistik F	58
Tabel 4.17 Uji Statistik t	59
Tabel 4.18 Hasil Pengujian Hipotesis	59

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berfikir Konseptual	25
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 yang terakhir diubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah atau sering juga disebut sebagai UU Otonomi Daerah serta UU Nomor 25 tahun 1999 yang terakhir diubah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan perubahan yang sangat mendasar terhadap pelaksanaan pemerintahan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara dan menjadi titik awal dari lahirnya era otonomi daerah di Indonesia (Arifdan Halim, 2013).

Salah satu tujuan dari dikeluarkannya paket UU tersebut yaitu agar pemerintah daerah dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, serta tantangan persaingan global (Arif dan Halim, 2013). Dengan dikeluarkannya paket regulasi UU tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran menjadi sangat penting dan relevan dalam suatu pemerintahan, karena anggaran akan berdampak terhadap kinerja pemerintah

yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran merupakan alat untuk mencegah informasi asimetri dan perilaku disfungsional dari pemerintah daerah (Yuhertiana, 2003) serta merupakan proses akuntabilitas publik (Bastian, 2001). Kinerja pimpinan publik akan dinilai berdasarkan hasil pencapaian target anggaran. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan kinerja aktual dengan yang dianggarkan (Mardiasmo, 2009).

Dalam perekonomian Indonesia, salah satu variabel dominan pendorong pertumbuhan ekonomi adalah faktor konsumsi, sehingga belanja pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah turut menjadi penentu pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu penyerapan anggaran yang digambarkan dari Kementerian/Lembaga akan memberikan efek *multiplier* yang berasal dari belanja yang dilakukan pemerintah. Selain mendukung program yang telah dicanangkan pemerintah, penyerapan anggaran yang merupakan salah satu bentuk konsumsi yang dilakukan pemerintah dapat menggerakkan sektor swasta. Terlebih lagi, apabila pengalokasian anggaran dilakukan secara efisien, maka keterbatasan sumber dana yang dimiliki negara dapat dioptimalkan untuk mendanai kegiatan strategis. Terkait dengan hal ini, pemerintah dalam pelaksanaan anggaran sangat fokus terhadap realisasi penyerapan anggaran, untuk menjamin bahwa dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015).

Fenomena yang menarik yang terjadi saat ini yaitu rendahnya tingkat penyerapan anggaran baik di tingkat pusat seperti lembaga kementerian

maupun di tingkat pemerintah daerah di Indonesia, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Mencermati permasalahan penyerapan anggaran baik di tingkat pusat maupun di daerah setiap tahun yang menunjukkan fenomena penyerapan anggaran sangat rendah di awal tahun dan bahkan hingga melewati triwulan kedua. Daya serap anggaran yang masih rendah menjadi isu besar dalam manajemen keuangan pemerintahan. Hampir di setiap paruh kedua tahun anggaran, banyak pihak meributkan daya serap anggaran yang rendah. Banyak pihak menuding hal ini berkontribusi terhadap kualitas pelayanan publik dan sulitnya mencapai target pertumbuhan ekonomi. Penganggaran memiliki peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan anggaran, karena jika dilakukan dengan baik akan memudahkan dalam pelaksanaan anggaran (BPKP, 2011). Rendahnya penyerapan anggaran tersebut muncul di saat tuntutan agar pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah semakin transparan dan akuntabel dalam rangka menuju *good government governance* dan tuntutan untuk efektif dan efisien.

Para pengamat ekonomi menyoroti masalah rendahnya tingkat penyerapan anggaran sebagai salah satu indikator kegagalan birokrasi. Dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, penyerapan anggaran bukan merupakan target alokasi anggaran. *Performance Based Budget* lebih menitikberatkan pada kinerja dibandingkan dengan penyerapan itu sendiri. Untuk mengukur kinerja suatu kegiatan, yang dilihat adalah *output* dan *outcomenya*. Namun variabel dominan pendorong pertumbuhan dalam kondisi perekonomian Indonesia saat ini adalah faktor konsumsi, sehingga belanja

pemerintah yang merupakan konsumsi pemerintah menjadi pendorong utama laju pertumbuhan ekonomi (BPKP, 2011).

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui situs resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merilis data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga memasuki triwulan ke empat tahun ini (2018) masih mencapai 60 persen dari total APBD yang sebesar Rp8,488 triliun (Biro Keuangan Pemprov Sumut, 2015).

Realisasi anggaran Pemerintah Kota Medan tahun 2017-2019 berdasarkan realisasi pendapatan, belanja operasional, belanja modal dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2017

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	5.523.623.117.419,81	4.409.065.482.200,50
2	Belanja Operasional	4.119.300.403.261,40	3.396.569.832.362,53
3	Belanja Modal	1.411.306.657.578,00	997.475.991.902,00
4	Pembiayaan Netto	30.461.191.559,59	30.461.191.559,79

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2017

Tabel 1.2
Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	5.239.408.011.116,00	4.253.618.758.532,53
2	Belanja Operasional	4.274.124.864.704,00	3.455.113.095.305,68
3	Belanja Modal	1.168.438.057.824,00	753.996.886.210,07
4	Pembiayaan Netto	28.701.504.535,76	28.701.504.535,76

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2018

Tabel 1.3
Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2019

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan	6.257.239.035.331,00	5.518.772.179.306,31
2	Belanja Operasional	4.992.707.636.172,86	4.066.127.201.868,64
3	Belanja Modal	1.300.255.956.255,19	992.661.245.694,74
4	Pembiayaan Netto	47.316.909.942,05	48.867.092.635,07

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Medan Tahun 2019

Sampai saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum memiliki definisi baku tentang standar dari berapa persen suatu daerah masuk ke dalam kategorisasi mengalami keminiman penyerapan APBD. Namun, ada beberapa daerah yang memiliki pakta integritas yang kemudian ditandatangani oleh Kepala SKPD, bahwa suatu pemerintah daerah akan tercatat mengalami keminiman serapan anggaran apabila sampai dengan akhir tahun tidak mampu merealisasikan 90% dari total APBD yang telah disusun (Arif dan Halim, 2013).

Berdasarkan fenomena rendahnya tingkat penyerapan anggaran baik di tingkat pemerintah pusat yang diproyeksikan dari anggaran kementerian/lembaga, di tingkat pemerintah provinsi, hingga pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk di Pemerintah Kota Medan, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kota Medan (Kantor Walikota Medan)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Administrasi dan dokumen pengadaan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada SKPD di Walikota Medan
2. Kurangnya realisasi penyerapan anggaran pada SKPD di Walokota Medan

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kantor Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara melalui pengisian kuisisioner. Peneliti memfokuskan analisis factor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dan peneliti juga memfokuskan penyerapan anggaran setelah revisi pengeluaran anggaran yang terjadi di SKPD.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran SKPD di kantor Walikota Medan?
2. Apakah administrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran SKPD di kantor Walikota Medan?

3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran SKPD di kantor Walikota Medan?
4. Apakah dokumen pengadaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran SKPD di kantor Walikota Medan?
5. Apakah ganti uang persediaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran SKPD di kantor Walikota Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji & menganalisis perencanaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran SKPD di kantor Walikota Medan.
2. Untuk menguji & menganalisis administrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran SKPD di kantor Walikota Medan.
3. Untuk menguji & menganalisis kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran SKPD di kantor Walikota Medan.
4. Untuk menguji & menganalisis dokumen pengadaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran SKPD di kantor Walikota Medan.
5. Untuk menguji & menganalisis ganti uang persediaan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran SKPD di kantor Walikota Medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat dalam rangka mengevaluasi kinerja pada Satuan

Kerja Perangkat Daerah dan seluruh lingkup Kantor Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara terutama kaitannya dengan pembangunan dan penyerapan anggaran.

2. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembangunan dan wawasan tentang bidang pemerintahan serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Stakeholder

Pengertian *stakeholder* menurut Freeman dan Reed (Ulum, 2009) adalah “sekelompok orang atau individu yang diidentifikasi dapat mempengaruhi dan dapat dipengaruhi oleh suatu tujuan pencapaian tertentu”. Para pemegang saham, para supplier, bank, para *customer*, pemerintah dan komunitas memegang peranan penting dalam organisasi (berperan sebagai *stakeholder*).

Pemerintahan merupakan bagian dari beberapa elemen yang membentuk masyarakat dalam sistem sosial yang berlaku. Keadaan tersebut kemudian menciptakan sebuah hubungan timbal balik antara pemerintah dan para *stakeholder* yang berarti pemerintah harus melaksanakan peranannya secara dua arah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan sendiri maupun *stakeholder* lainnya dalam sebuah sistem sosial. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dihasilkan dan dilakukan oleh masing-masing bagian dari stakeholder akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemerintah sebagai *stakeholder* yang memiliki peran penting dalam proses memajukan suatu daerah, pemerintah diharapkan mampu untuk melakukan upaya pembangunan secara maksimal. Kemajuan suatu daerah dilihat dari bagaimana pemerintah sebagai

pemegang kekuasaan tertinggi suatu daerah harus mampu mengelola anggaran yang ada untuk kepentingan rakyat didaerahnya.

Kepentingan rakyat yang dimaksudkan disini adalah bagaimana anggaran yang telah disahkan tersebut memang merupakan representasi dari apa yang diinginkan oleh rakyat sehingga hasilnya akan kembali kepada rakyat itu juga nantinya. Pelayanan, Strategi, dan Operasi dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di daerah tersebut menjadi tanggung jawab bersama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai *stakeholder* pemerintah daerah. Hal tersebut dapat tercermin dalam proses penggunaan anggaran yang efektif dan efisien sehingga tidak menyebabkan penyerapan realisasi yang rendah.

2.1.2 Anggaran (*Budget*) dan Penganggaran (*Budgeting*)

Menurut Nafarin (2010:11) anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang.

Menurut Abdul (2012:89) anggaran adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk suatu periode.

Menurut Undang – undang Tahun 2016, anggaran adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggaran merupakan salah satu alat vital suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Anggaran merupakan sarana utama untuk perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan dalam setiap perusahaan. Rencana ini biasanya mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan suatu pendekatan formal dan sistematis dari pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi dan pengendalian. Dalam pasal 14 ayat (6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 telah disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/lembaga.

“Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran” (Mardiasmo, 2009:61). Terdapat hubungan yang erat antara anggaran, perencanaan dan pengendalian, dimana perencanaan digunakan untuk melihat kedepan terkait dengan tindakan apa yang seharusnya diambil untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pengendalian lebih melihat kebelakang, menentukan apa yang sebenarnya telah terjadi dan membandingkannya dengan perencanaan.

2.1.3 Penyerapan Anggaran

Menurut Munandar (2012:1), penyerapan anggaran adalah seluruh kegiatan pelaksanaan anggaran yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan. Selain itu Permendagri menjelaskan bahwa

penyerapan anggaran adalah suatu rencana sistematis yang berisikan tentang seluruh aktivitas serta kegiatan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu untuk diwujudkan secara nyata.

Penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan jasa, memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu setiap instansi pemerintah harus mengatur pengeluarannya agar berjalan lancar dan dapat mendukung keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Namun demikian penyerapan anggaran tidak diharuskan mencapai 100%, tetapi penyerapan anggaran diharapkan mampu memenuhi setidaknya-tidaknya lebih dari 80% anggaran yang telah ditetapkan. Tinggi rendahnya penyerapan anggaran dalam suatu SKPD menjadi tolak ukur kinerja dari SKPD tersebut.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan dan pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini kesatuan langkah dalam pelaksanaan, pemerintah sebagai pelaksana dari UU APBN selanjutnya menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai dasar hukum pelaksanaan APBN. Pada saat ini Keppres yang berlaku adalah Keppres nomor 42 tahun 2002.

Mardiasmo (2009) mengatakan bahwa Kinerja manajer publik akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, berapa yang berhasil

dicapai. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Dalam teori ekonomi makro, belanja pemerintah merupakan salah satu elemen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Belanja pemerintah, khususnya belanja barang dan jasa, merupakan salah satu komponen utama yang membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestic Product (GDP). PDB dibentuk melalui unsur-unsur pengeluaran konsumsi pribadi, investasi swasta, ekspor netto (ekspor – impor), dan belanja pemerintah. Semakin besar keuangan Negara yang dibelanjakan, maka akan semakin besar porsi pemerintah dalam membentuk PDB, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sendiri dimulai ketika Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disahkan oleh DPR. Dalam rangka terjadinya kesatuan pemahaman serta terbentuk dari peningkatan jumlah PDB. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan PDB tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu indikator tingkat keberhasilan pembangunan bidang ekonomi.

2.1.4 Sistem Penganggaran di Indonesia

Sistem penganggaran di Indonesia tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Murwanto dalam Herriyanto (2012) APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintahan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berisi daftar sistematis dan terperinci atas rencana penerimaan dan pengeluaran negara

selama satu tahun anggaran (1 Januari–31 Desember) dan ditetapkan dengan Undang-Undang serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

APBN terdiri dari pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan adalah merupakan instrumen utama kebijakan fiskal untuk mengarahkan perekonomian nasional dan menstimulus pertumbuhan ekonomi sehingga besarnya penyerapan akan berdampak pada semakin besarnya daya dorong terhadap pertumbuhan. Rasio realisasi penyerapan belanja Kementerian atau Lembaga terhadap pagu anggaran belanja merupakan suatu bentuk indikator efektivitas belanja negara. Selain itu kebijakan APBN diharapkan dapat merespon dinamika rakyat baik yang terkait dengan perkembangan perekonomian secara luas, maupun kehidupan rakyat itu sendiri, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang bersifat fleksibel (Rahayu, 2011).

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran

2.1.5.1 Perencanaan

Perencanaan anggaran adalah aktivitas analisis dan pengambilan keputusan ke depan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Perencanaan strategik merupakan proses sistematis yang disepakati organisasi dan membangun keterlibatan diantara *stakeholder* utama tentang prioritas yang hakiki bagi misinya dan tanggap terhadap lingkungan operasi (Allison dan Kaye, 2005).

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis dan melibatkan aspek operasional. Dalam hal perencanaan organisasi akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan pada dasarnya merupakan indikator kinerja yang diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangannya.

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di Pemda, melalui dokumen usulan anggaran yang disebut Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK). RASK kemudian diteliti oleh tim anggaran eksekutif untuk dinilai kelayakannya (berdasarkan urgensi dan ketersediaan dana) diakomodasi dalam RAPBD yang akan disampaikan kepada legislatif. RAPBD kemudian dipelajari oleh panitia anggaran legislatif dan direspon oleh semua komisi dan fraksi dalam pembahasan anggaran (Abdullah, 2006). Perencanaan anggaran dalam sektor publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Bagi organisasi sektor publik anggaran bukan hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

Dokumen perencanaan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota menurut Darise (2007) terdiri dari: 1)Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 2)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 3)Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan dokumen perencanaan yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdiri dari: 1)Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat daerah (Renstra-SKPD) dan; 2)Rencana Kerja SKPD. Masing-masing dokumen perencanaan tersebut terkait satu dengan lainnya, dan juga dengan dokumen pembangunan nasional.

2.1.5.2 Administrasi

Administrasi pengertian sehari-hari sering disamakan dengan tata usaha, yaitu berupa kegiatan mencatat, mengumpulkan dan menyimpan suatu kegiatan atau hasil kegiatan untuk membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. Administrasi ialah keseluruhan rangkaian dari proses kerjasama antara beberapa orang yang didasarkan atas asas rasionalitas untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2002).

Dari segi perkembangannya, administrasi dapat dibagi atas dua bagian besar, yaitu administasi negara dan niaga. Administrasi negara ialah keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Administrasi niaga ialah keseluruhan kegiatan mulai dari produksi barang dan/atau jasa sampai tibanya barang atau jasa tersebut ditangan konsumen. Adapun fungsi-fungsi dari administrasi dan manajemen antara lain yaitu; 1)Perencanaan(*Planning*); 2)Pengorganisasian (*Organizing*); 3)Pemberian

Motivasi (*Motivating*); 4)Pengawasan (*Controlling*); 5)Penilaian (*Evaluating*) (Siagian, 2002). Fungsi-fungsi tersebut mutlak harus dijalankan oleh administrasi dan manajemen. Ketidakmampuan untuk menjalankan fungsi-fungsi itu akan mengakibatkan lambat atau cepat matinya organisasi.

2.1.5.3 Kompetensi sumber daya manusia (SDM)

Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya roda pemerintahan ini adalah sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga). SDM sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis pengadaan barang dan jasa. Sehingga kompetensi SDM menjadi salah satu factor yang ingin diuji dengan item pembentuk faktor diantaranya adalah SDM pelaksana pengadaan barang dan jasa kurang kompeten, panitia pengadaan barang dan jasa melaksanakan tugas lebih dari satu (rangkap tugas), keterbatasan pejabat/pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat.

Menurut Nawawi (2002) ada tiga pengertian Sumber Daya Manusia yaitu: 1)Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan); 2)Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi

sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya; 3) Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material/non finansial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (*real*) secara fisik dan non-fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.

2.1.5.4 Dokumen Pengadaan

Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jenis dokumen pengadaan terdiri dari dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, dan dokumen pengadaan jasa konsultasi. Dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya terdiri dari dokumen pemilihan penyedia dan dokumen pasca/prakualifikasi. Sedangkan dokumen pengadaan jasa konsultasi terdiri dari dokumen pemilihan penyedia dan dokumen prakualifikasi.

Informasi yang diperlukan dalam penyusunan dokumen diantaranya; 1) Peraturan perundang-undangan yang diterapkan; 2) Jenis kontrak; 3) Sumber dana; 4) Metoda pengadaan; 5) Nilai kontrak; 6) Standar-standar Nasional Indonesia (Herriyanto, 2012). Ketentuan pokok dalam penyusunan dokumen pengadaan (Rahayu, 2011) antara lain: 1) Dokumen pengadaan disiapkan panitia/pejabat pengadaan dan disahkan pengguna barang/jasa; 2) Isi harus lengkap dan jelas, serta tidak menimbulkan penafsiran jamak (multi tafsir); 3) Perubahan (adendum) dokumen

diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.5.5 Ganti Uang Persediaan

Ganti Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (Amir, 2013).

UP hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran yang tidak mungkin dilaksanakan dengan pembayaran secara langsung atau dapat diartikan kegiatan yang sifatnya insidental/mendesak. Hal ini wajib dipahami oleh pengelola keuangan baik KPA, PPK, PPTK, PP SPM dan Bendahara Pengeluaran. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Penggunaan atas UP ini nantinya akan dibayar ke kas daerah melalui GU.

UU yang mendasari mengenai GU ini diantaranya adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sedangkan Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan. Syarat dalam pengajuan TUP yaitu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan apabila tidak habis digunakan dalam satu bulan sisa dana yang ada pada bendahara, harus disetor ke Rekening Kas Negara kecuali mendapatkan dispensasi perpanjangan waktu pertanggungjawaban TUP lebih dari satu bulan dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

2.2 Kerangka Konseptual

2.2.1 Pengaruh Perencanaan terhadap Penyerapan Anggaran

Anggaran sebagai salah satu sumber dana yang digunakan dalam kegiatan membangun guna kepentingan masyarakat pada penyusunannya harus memperhitungkan kemungkinan rencana dana belanja yang baiknya digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan fungsi anggaran sebagai alat perencanaan. Perencanaan anggaran tersusun dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Kuswoyo (2012) dalam penelitiannya mengenai faktor-faktor penyebab penumpukan anggaran belanja diakhir tahun anggaran pada satuan kerja di wilayah KPPN Kediri menyimpulkan bahwa faktor perencanaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyebab penumpukan anggaran belanja. Penelitian yang dilakukan oleh Priatno (2013) menyimpulkan bahwa factor perencanaan memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja dan penelitian yang dilakukan oleh perencanaan yang baik sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan proram kegiatan yang telah disusun tidak menemui hambatan sehingga penyerapan anggaran berjalan tepat waktu. Dengan demikian, dapat diduga bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh faktor perencanaan.

2.2.2 Pengaruh Administrasi terhadap Penyerapan Anggaran

Administrasi dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa administrasi menjadi salah satu bagian dari proses pembangunan, karena kegiatan yang dilakukan tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan daerah yang disusun dalam sistem pemerintahan. Jika bagian administrasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka hasil dari proses dalam pencapaian tujuan pun dapat tercapai. Administrasi juga dapat dikatakan sebagai penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan.

Penelitian Herriyanto (2012) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada satuan kerja Kementerian/Lembaga di wilayah Jakarta menyimpulkan bahwa administrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Pencatatan administrasi menjadi salah satu faktor yang diteliti dengan item pembentuk faktor diantaranya adalah salah dalam penentuan akun, masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu pendek, kurangnya pemahaman terhadap peraturan mengenai mekanisme pembayaran, adanya tambahan pagu, berubahnya pelaksanaan kegiatan atas dasar memo kepala daerah, verifikasi yang terlalu lama dari PPKAD/BUD. Dengan demikian, dapat diduga bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh faktor administrasi.

2.2.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusi terhadap Penyerapan Anggaran

Salah satu faktor utama yang menentukan baik atau tidak jalannya roda pemerintahan ini adalah kompetensi sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari bagaimana manusia sebagai tenaga kerja menggunakan potensi fisik dan psikis yang ia miliki secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi (lembaga). Fungsi pemerintah sebagai SDM dapat diwujudkan dalam prakteknya melalui kegiatan pemerintah sebagai pengelola keuangan negara dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Kualitas sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa

pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien (Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007). SDM sebagai tenaga kerja dalam pelaksanaan penganggaran terlihat pada fungsi manusia sebagai satuan kerja yang memiliki tugas salah satunya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa yang harus memahami dengan baik tata cara dan prosedur teknis pengadaan barang dan jasa. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2014) menyimpulkan bahwa faktor sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran akhir tahun Kota Pekalongan tahun 2013. Dengan demikian, dapat diduga bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh kompetensi SDM.

2.2.4 Pengaruh Dokumen Pengadaan terhadap Penyerapan Anggaran

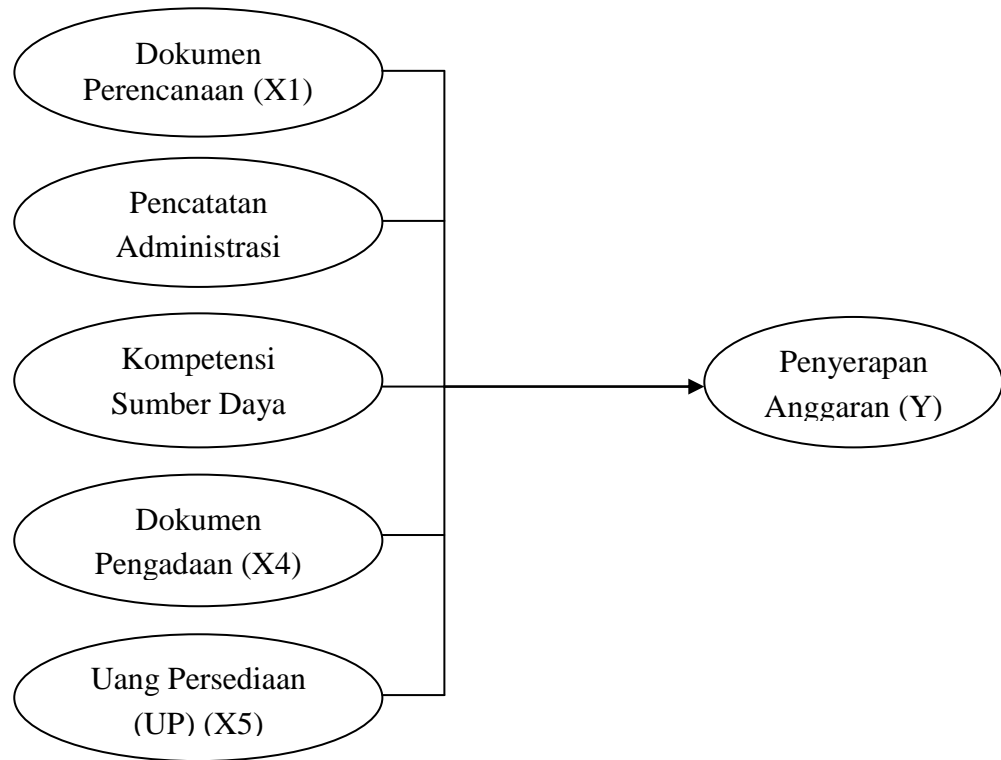
Dalam kegiatan pembelian barang dan jasa pemerintah diperlukan penyusunan dokumen pengadaan. Dalam penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa terdapat beberapa urgensi penyusunan dokumen pemilihan penyedia seperti menjadi dasar dalam pelaksanaan dalam pelelangan sampai pelaksanaan kontrak, kesalahan dokumen yang dapat berakibat fatal dan belum adanya standar dokumen yang berlaku secara nasional. Terdapat ketentuan pedoman penyusunan dokumen pengadaan yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penelitian Herriyanto (2012) menyimpulkan bahwa dokumen pengadaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Fitriany (2014) juga menyimpulkan bahwa factor dokumen merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran akhir tahun Kota Pekalongan tahun 2013. Dengan demikian, dapat diduga bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh dokumen pengadaan.

2.2.5 Pengaruh Ganti Uang Persediaan terhadap Penyerapan Anggaran

Mekanisme pengeluaran APBN melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dikenal mekanisme pengeluaran langsung dan pengeluaran melalui uang persediaan. Untuk membantu pengelolaan uang persediaan pada kantor/satker di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga, kepala satker dapat menunjuk Pemegang Uang Muka (PUM). PUM bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali UP (*revolving*) sepanjang masih tersedia dana dalam DPA.

Penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) menyatakan bahwa ganti uang persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran. Salah satu UU yang mendasari mengenai GU ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian, dapat diduga bahwa penyerapan anggaran dipengaruhi oleh pengajuan GUP



Sumber: Data diolah

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, hipotesis ini adalah :

1. Perencanaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kantor Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara
2. Administrasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kantor Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kantor Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara

4. Dokumen Pengadaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kantor Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara
5. Ganti Uang Persediaan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kantor Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survey. Menurut Nawawi (2003 : 64) metode deskriptif yaitu metode-metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif adalah metode survey. Metode survey adalah penelitian yang mengambil sample dari satu populasi dan menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpul data yang pokok (Singarimbun, 1998).

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasionalisasi adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel-variabel tersebut dilapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran. Pertanyaan dan pernyataan dalam kuesioner untuk masing-masing variable.

Realisasi anggaran merupakan tindakan menindaklanjuti rencana anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang di dalam APBN. Anggaran dapat terserap secara maksimal ataupun tidak. Pada penelitian

ini akan dilihat apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Medan.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel independen merupakan tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini, terdapat lima variabel yang tergolong dalam variabel independen yaitu:

1. Perencanaan

Menurut Herlambang (2013:46) perencanaan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah – masalah yang berkembang di masyarakat, menetapkan tujuan program yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Administrasi

Menurut Handayani (1988:2) mengatakan “Administrasi secara sempit berasal dari kata *Administratie* (bahasa Belanda) yaitu meliputi kegiatan cata-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan”.

3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Menurut Mangkunegara (2012:40), kompetensi sumber daya manusia adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja.

4. Dokumen Pengadaan

Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, jenis dokumen pengadaan terdiri dari dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, dan dokumen pengadaan jasa konsultasi. Dokumen pengadaan barang/jasa pemborongan/jasa lainnya terdiri dari dokumen pemilihan penyedia dan dokumen pasca/prakualifikasi.

5. Ganti Uang Persediaan (UP)

Ganti Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (*revolving*) yang diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung (Amir, 2013).

3.2.2 Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Nama lain dari variabel ini adalah variabel yang diduga sebagai akibat atau variabel konsekuensi (Indriantoro dan Supomo, 2002). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyerapan anggaran.

1. Penyerapan Anggaran

Menurut Halim (2014: 84), penyerapan anggaran adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dipandang pada suatu saat tertentu (realisasi dari anggaran).

Tabel 3.1
Defini Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Penyerapan Anggaran (Y)	Kemampuan dari masing-masing SKPD dalam menyerap anggaran penerimaan dan belanja daerah.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan (realisasi) anggaran dari pagu anggarann. 2. Tingkat penyerapan (realisasi) anggaran 3. Persentase penyerapan (realisasi) anggaran belanja operasional 4. Persentase penyerapan (realisasi) anggaran belanja modal 5. Persentase penyerapan (realisasi) anggaran belanja operasional dengan belanja modal 	Interval
Perencanaan (X1)	Proses penentuan program- program utama yang akan dilakukan suatu organisasi dalam rangka implementasi strategi dan menaksir, aktivitas, atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pagu anggaran 2. Kesesuaian antara perencanaan dengan kebutuhan organisasi 3. Perhitungan kelayakan komposisi belanja 4. Program persetujuan DPRD 	Interval
Administrasi (X2)	Kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan cata-mencatat, surat menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Akun 2. Waktu penyusunan dan penelaahan anggaran 3. Mengverifikasi dari PPKAD/BUD 4. SK Panitia 	Interval
SDM (X3)	Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan SKPD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi 2. Berita penangkapan pejabat korupsi 3. Rangkap Tugas/Jabatan 4. Keseimbangan resiko kerja 5. Mutasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 	Interval
Dokumen Pengadaan (X4)	Jenis dokumen pengadaan yang terdiri dari dokumen pengadaan barang/jasa, pemborongan/jasa lainnya dan dokumen pengadaan jasa konsultansi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Dokumen 2. Kelengkapan Berkas SPJ 3. Kelengkapan Berkas Pengadaan Kontrak dan Lelang 	Interval

		4. Kesalahan penentuan dalam dokumen pengadaan	
Ganti Uang Persediaan (X5)	Uang muka kerja yang bersifat daur ulang (<i>revolving</i>) untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan UP dengan pengajuan ganti uang persediaan 2. Intensitas Pengajuan Permohonan GU Peruntukan dana Jadwal pengajuan 3. Up sesuai peruntukannya 4. Up sesuai jadwal 	Interval

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Kantor Walikota Medan Sumatera utara yang berada di Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Sumatera Utara.

Waktu Penelitian

Tabel 3.2
Jadwal Penelitian

No	Aktivitas penelitian	Desember 2020				Januari 2021				Febuari 2021				Maret 2021				April 2021				Mei 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■																							
2	Pengumpulan Data																								
3	Penyusunan Proposal		■																						
4	Bimbingan Proposal		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
5	Seminar Proposal													■											
6	Penyusunan Skripsi														■	■	■								

disediakan Kuesioner tersebut selanjutnya disebarakan kepada Pegawai sampel.

3.6 Uji Kualitas Data

Sebelum data diolah lebih lanjut, harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Karena kuesioner sebagai instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini harus diuji validitas dan reabilitasnya. Uji dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari pengguna instrumen.

3.6.1 Uji Validitas

Validitas adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono, 2013). Uji validitas untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner dalam penelitian ini. Sebuah instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan uji *Person Product – Moment Coefficien of Correlation*. Penelitian dinyatakan valid, jika $R_{hitung} > R_{tabel}$.

Pengujian validitas instrumen dengan menggunakan *software* SPSS, nilai validitas dapat dilihat pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* (r_{hitung}). Jika angka korelasi yang diperoleh lebih besar dari pada angka kritik ($r_{hitung} > r_{tabel}$) maka instrumen tersebut dikatakan valid. Berdasarkan hasil uji validitas dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh item pernyataan untuk mengukur masingmasing variabel

penelitian dinyatakan valid. Hal ini dapat dilihat bahwa tidak seluruh r hitung lebih besar r tabel, dimana nilai r tabel untuk sampel sebanyak 30 adalah 0,374, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini:

Tabel 3.3
Uji Validitas

Variabel	Butir Pertanyaan	R Hitung	r Tabel	Ket
Penyerapan Anggaran (Y)	1. Penyerapan (realisasi) Anggaran pernah mencapai 100% dari Pagu Anggaran	0,534	0,374	Valid
	2. Tingkat penyerapan (realisasi) anggaran naik dari tahun sebelumnya	0,618	0,374	Valid
	3. Persentase penyerapan (realisasi) anggaran Belanja Operasional di atas 90%	0,517	0,374	Valid
	4. Persentase penyerapan (realisasi) anggaran Belanja Modal di atas 90%	0,711	0,374	Valid
	5. Persentase penyerapan (realisasi) anggaran Belanja Operasional selalu lebih tinggi dari Belanja Modal	0,618	0,374	Valid
Perencanaan (X ₁)	1. Sebelum penyusunan anggaran, dilakukan evaluasi anggaran tahun sebelumnya.	0,513	0,374	Valid
	2. Program yang diajukan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi.	0,782	0,374	Valid
	3. Pelaksanaan program dapat diperhitungkan kelayakan komposisi belanja	0,720	0,374	Valid
	4. Program yang belum mendapat persetujuan dari DPRD	0,676	0,374	Valid
	5. Adanya kegiatan yang memiliki dasar hukum yang jelas	0,272	0,374	Valid
Administrasi (X ₂)	1. Terjadi kesalahan dalam penentuan akun program kegiatan.	0,799	0,374	Valid
	2. Masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang singkat	0,613	0,374	Valid
	3. Verifikasi yang terlalu cepat dari PPKAD/BUD	0,698	0,374	Valid
	4. SK Panitia Lelang cepat ditetapkan	0,799	0,374	Valid
	5. Adanya masalah sertifikat	0,043	0,374	Valid

pejabat pelaksana pengadaan yang masih kurang					
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X ₃)	1.	Aparatur pelaksana pengadaan kurang berkompeten dalam menangani program/kegiatan.	0,778	0,374	Valid
	2.	Kekhawatiran Pejabat pengadaan akibat pemberitaan penangkapan dengan tuduhan korupsi.	0,711	0,374	Valid
	3.	Rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan maupun jabatan lainnya	0,587	0,374	Valid
	4.	Keengganan menjadi pejabat pengadaan karena adanya keseimbangan resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima	0,715	0,374	Valid
	5.	Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan sering mengalami mutasi	0,663	0,374	Valid
Dokumen Pengadaan (X ₄)	1.	Dokumen Kontrak ditanda tangani karena terdapat berbagai permasalahan seperti masih menunggu persetujuan tender.	0,533	0,374	Valid
	2.	Berkas SPJ lengkap saat pengajuan GU/TU.	0,440	0,374	Valid
	3.	Berkas Pengadaan Kontrak dan Lelang lengkap saat pengajuan LS	0,569	0,374	Valid
	4.	Gagal Bayar akibat salah dalam penentuan kode rekening dalam dokumen pengadaan.	0,582	0,374	Valid
	5.	Pemalsuan dokumen pengadaan, seperti berita acara pemeriksaan, berita acara serah terima barang yang ditandatangani sendiri.	0,304	0,374	Valid
Ganti Uang Persediaan (X ₅)	1.	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tapi diganti dengan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU).		0,374	Valid
	2.	Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar.		0,374	Valid
	3.	Sisa UP/TUP yang disetorkan ke kas daerah.		0,374	Valid
	4.	Up digunakan sesuai peruntukannya		0,374	Valid
	5.	Pengajuan UP sesuai jadwal.		0,374	Valid

Sumber : Hasil uji validitas kuisioner, 2021

Berdasarkan hasil uji validitas diperoleh hasil:

1. Hasil uji validitas penyerapan anggaran seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid karena seluruh nilai r hitung butir pertanyaan $> r$ tabel.
2. Hasil uji validitas perencanaan terdapat satu butir pertanyaan memiliki nilai r hitung $<$ dari r tabel yaitu butir pertanyaan nomor 5 sehingga tidak dapat digunakan dalam pengolahan data selanjutnya.
3. Hasil uji validitas administrasi terdapat satu butir pertanyaan yang tidak valid yaitu pertanyaan nomor 5 karena nilai r hitung $<$ r tabel tidak dimasukkan sebagai item pernyataan untuk mengolah data selanjutnya.
4. Hasil uji validitas kompetensi sumber daya manusia seluruh butir pertanyaan dinyatakan valid karena seluruh nilai r hitung butir pertanyaan $>$ r tabel sehingga semua item dapat digunakan dalam pengolahan data selanjutnya.
5. Hasil uji validitas dokumen pengadaan dapat dilihat butir pertanyaan nomor 5 dinyatakan tidak valid karena nilai r hitung $<$ r tabel sehingga tidak dimasukkan sebagai item pernyataan untuk mengolah data selanjutnya.
6. Hasil uji validitas ganti uang persediaan, butir pertanyaan nomor 3 tidak valid karena nilai r hitung $<$ r tabel sehingga tidak dapat digunakan dalam pengolahan data selanjutnya.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas yaitu untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan pada uji reliabilitas adalah metode *Cronbach Alpha* (α) yang lazim digunakan untuk pengujian kuesioner. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau $\alpha > 0,6$ (Sekaran, 2014:182).

Setelah dilakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas data yaitu dengan melihat nilai *cronbach's alpha*. Jika nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,7 maka kuisisioner penelitian tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2013).

Tabel 3.4
Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Ket
Perencanaan (X1)	0,803	0,7	Reliabel
Administrasi (X2)	0,780	0,7	Reliabel
Kompetensi SDM (X3)	0,864	0,7	Reliabel
Dokumen Pengadaan (X4)	0,720	0,7	Reliabel
Ganti Uang Persediaan (X5)	0,712	0,7	Reliabel
Penyerapan Anggaran (Y)	0,811	0,7	Reliabel

Sumber: Hasil Uji Reliabilitas, 2021

Berdasarkan tabel 3.4 *reliability statistics* tampak nilai *Cronbach Alpha* dari setiap variabel penelitian memiliki nilai lebih besar dari 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kuisisioner yang digunakan dalam penelitian reliabel atau andal

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda (*Multiple Regression Analysis*) dan uji residual untuk moderating variabel. Data penelitian ini diolah dengan menggunakan program

Statistical Package for Social Science (SPSS). Analisis regresi berganda bermaksud untuk memperkirakan bagaimana keadaan variabel dependen bila dihubungkan dengan dua atau lebih variabel independen. Untuk menguji variabel moderating dipilih menggunakan uji residual. Dengan persamaan regresi berganda pada model I dan uji residual pada model II.

1. Analisis regresi berganda, untuk menjawab hipotesis pertama.

Model regresi yang digunakan yaitu :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + b_5 X_5 + e \dots(1)$$

Keterangan :

Y = Penyerapan Anggaran (*Dependent Variable*)

a = Nilai Y apabila $X_1 = X_2 = 0$

b_1, b_2, \dots, b_n = Koefisiensi Regresi Berganda (*Multiple Regression*)

X_1 = Perencanaan (*Independent Variable*)

X_2 = Administrasi (*Independent Variable*)

X_3 = Kompetensi SDM (*Independent Variable*)

X_4 = Dokumen Pengadaaan (*Independent Variable*)

X_5 = Ganti Uang Persediaan (*Independent Variable*)

e = *error term*

$|e|$ = Nilai residual mutlak

Hipotesis kedua menggunakan analisis linier regresi berganda dengan variabel moderating. Ghozali (2013) menyatakan variabel moderating adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperl lemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Pengujian variable moderating dalam penelitian ini

menggunakan uji residual. Uji residual dapat menunjukkan apakah suatu variabel dapat dikatakan sebagai variabel moderating atau tidak. Jika hasil uji residual suatu variabel memiliki koefisien signifikansi lebih kecil dari 0,05 yang berarti signifikan dan bernilai negatif hasilnya maka variabel ini dapat dijadikan sebagai variabel moderating.

3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik perlu dilakukan sebagai persyaratan dalam analisis agar data dapat bermakna dan bermanfaat. Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

3.7.2.1 Uji Normalita

Pengujian Normalitas data bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Pada penelitian digunakan uji statistik untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak (Ghazali, 2013). Uji normalitas data menggunakan *Uji Kolmogorov-Smirnov* yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan tingkat signifikansi tertentu yaitu:

- a. Nilai Signifikan atau probabilitas $< 0,05$, maka distribusi data adalah tidak normal.
- b. Nilai Signifikan atau probabilitas $> 0,05$, maka distribusi data adalah normal.

3.7.2.2 Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji korelasi antara variable independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen (Ghozali, 2013). Pengujian multikolonieritas dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance*. Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan tidak terjadinya multikolonieritas adalah nilai *tolerance* harus $\geq 0,10$ atau sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel ≤ 10 .

3.7.2.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2013), uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.7.3 Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis berupa uji perbedaan antara nilai sampel dengan populasi atau nilai data yang diteliti dengan nilai ekspektasi (hipotesis) Peneliti (Erlina, 2011). Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan koefisien Determinasi (R^2), uji F, dan uji t, dan uji residual.

3.7.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *Adjusted R^2* pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai *Adjusted R^2* dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3.7.3.2 Uji F

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah:

$$H_0: \beta = 0,$$

maka perencanaan, administrasi, SDM, dokumen pengadaan, dan pengajuan GU, secara simultan tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.

$$H_1: \beta \neq 0,$$

maka perencanaan, administrasi, SDM, dokumen pengadaan, dan pengajuan GU, secara simultan berpengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.

Kriteria pengujian:

P Value (Sig) < 0,05 = H₀ (terima H₀ tolak H₁)

P Value (Sig) > 0,05 = H₁ (terima H₁ tolak H₀)

3.7.3.3 Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh satu variable independen secara individual atau parsial dapat menerangkan variasi variable terikat. Adapun langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji t adalah:

H₀: $\beta = 0$,

maka perencanaan, administrasi, SDM, dokumen pengadaan, dan pengajuan GU, secara parsial tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.

H₁: $\beta \neq 0$,

maka perencanaan, administrasi, SDM, dokumen pengadaan, dan pengajuan GU secara parsial berpengaruh terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.

Kriteria pengujian:

P Value (Sig) > 0,05 = H₀ (terima H₀ tolak H₁)

P Value (Sig) < 0,05 = H₁ (terima H₁ tolak H₀)

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu kota di Propinsi Sumatera Utara. Kota Medan memiliki luas 26.510 hektare (265,10 km²) atau 3,6% dari keseluruhan wilayah Sumatra Utara. Dengan demikian, dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya, Medan memiliki luas wilayah yang relatif kecil dengan jumlah penduduk yang relatif besar. Secara geografis kota Medan terletak pada 3° 30' – 3° 43' Lintang Utara dan 98° 35' - 98° 44' Bujur Timur. Untuk itu topografi kota Medan cenderung miring ke utara dan berada pada ketinggian 2,5 - 37,5 meter di atas permukaan laut (Sumber: wikipedia.com).

4.1.2 Deskripsi Responden

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, maka diperoleh data tentang responden penelitian yang terdiri dari: (1) Jenis Kelamin, (2) Tingkat Pendidikan, (3) Latar Belakang Pendidikan, dan (4) Kursus/diklat/bimbingan teknis di bidang akuntansi, pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan yang pernah diikuti responden.

Tabel 4.1
Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Pria	27	42,2%
2	Wanita	37	57,8%
Total		64	100%

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuisisioner, 2021

Berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat persentase responden pria sebanyak 27 orang atau sebesar 42,2% dan responden wanita sebanyak 37 orang atau 57,8%.

Selanjutnya responden juga diukur berdasarkan tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	SLTA	15	23,4%
2	Diploma (D3)	11	17,2%
3	S1	36	56,3%
4	S2	2	3,1%
Total		64	100%

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuisisioner, 2021

Berdasarkan tingkat pendidikan, dapat dilihat sebanyak 15 orang (23,4 %) responden memiliki tingkat pendidikan SLTA, 11 orang (17,2%) responden dengan tingkat pendidikan Diploma, 36 orang (56,3%) dengan tingkat pendidikan S1, dan 2 orang (3,1%) responden dengan tingkat pendidikan S2.

Tabel 4.3
Latar Belakang Pendidikan Responden

No	Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Akuntansi	4	6,25%
2	Non Akuntansi	60	93,75%
Total		64	100%

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuisisioner, 2021

Untuk tingkat latar belakang pendidikan responden, dapat dilihat responden yang memiliki latar belakang pendidikan Akuntansi sebanyak 4 orang atau 6,25%, dan responden yang memiliki latar belakang pendidikan non Akuntansi sebanyak 60 orang atau 93,75%.

Tabel 4.4
**Intensitas Kursus/Diklat/Bimtek di Bidang Akuntansi atau
Pengelolaan Keuangan Daerah ataupun Penyusunan Laporan
Keuangan yang Pernah diikuti Responden**

No	Frekuensi	Frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah	9	14,1%
2	1-2 kali (pernah)	39	60,9%
3	3-5 kali (minim)	14	21,9%
4	6-10 kali (sering)	2	3,1%
5	11-20 kali (sangat sering)	-	-
Total		64	100%

Sumber: Hasil Rekapitulasi Kuisisioner, 2021

Untuk Intensitas Kursus/Diklat/Bimtek di Bidang Akuntansi atau Pengelolaan Keuangan Daerah ataupun Penyusunan Laporan Keuangan yang pernah diikuti responden, dapat dilihat mayoritas responden hanya pernah mengikutinya sebanyak 1-2 kali saja yaitu sebanyak 39 orang (60,9%) responden.

4.1.3 Statistik Deskripsi Frekuensi

4.1.3.1 Variabel Perencanaan (X1)

Dari hasil kuisisioner diperoleh gambaran mengenai variabel penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5
Persepsi responden terhadap perencanaan yang dijalankan di SKPD responden

No	Pernyataan	F %	SS	S	KS	TS	STS	Rata-rata Skor
1	Penyusunan anggaran melakukan evaluasi terlebih dahulu.	F	25	39	-	-	-	4.39
		%	39.1	60.9	-	-	-	
2	Program yang diajukan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi.	F	19	43	2	-	-	4.26
		%	29.7	67.2	3.1	-	-	
3	Program yang dilaksanakan dapat diperhitungkan kelayakan komposisi belanja.	F	33	30	1	-	-	4.5
		%	51.6	46.9	1.6	-	-	
4	Program yang mendapat persetujuan dari DPRD sehingga mempercepat pelaksanaan kegiatan.	F	41	21	2	-	-	4.61
		%	64.1	32.8	3.1	-	-	

Sumber: Rekapitulasi Jawaban Responden, 2021

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap penyusunan perencanaan yang dijalankan di SKPD responden paling tinggi adalah tentang Program yang mendapat persetujuan dari DPRD sehingga mempercepat pelaksanaan kegiatan dengan rata-rata sebesar 4,61. Sedangkan, responden paling rendah adalah tentang Program yang

diajukan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi dengan rata-rata sebesar 4,26.

1.1.3.2 Variabel Administrasi (X2)

Dari hasil kuisioner diperoleh gambaran mengenai variabel penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut:

Tabel 4.6
Persepsi responden terhadap proses administrasi yang dilaksanakan di SKPD responden

No	Pernyataan	F %	SS	S	KS	TS	STS	Rata-rata Skor
1	Terjadi kesalahan dalam penentuan akun program kegiatan.	F	6	54	4	-	-	4.03
		%	9.1	84.4	6.3	-	-	
2	penyusunan dan penelaahan anggaran yang singkat	F	13	49	2	-	-	4.17
		%	20.3	76.6	3.1	-	-	
3	Verifikasi yang cepat dari PPKAD/BUD	F	24	39	1	-	-	4.35
		%	37.5	60.9	1.6	-	-	
4	SK panitia cepat ditetapkan	F	24	20	7	-	-	3.45
		%	57.8	31.3	10.9	-	-	

Sumber: Rekapitulasi Jawaban Responden, 2021

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap proses administrasi yang dijalankan di SKPD responden paling tinggi adalah tentang Verifikasi yang cepat dari PPKAD/BUD dengan rata-rata sebesar 4,35. Sedangkan, responden paling rendah adalah tentang SK panitia cepat ditetapkan dengan rata-rata sebesar 3,45.

1.1.3.3 Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X3)

Dari hasil kuisioner diperoleh gambaran mengenai variabel penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut:

Tabel 4.7
Persepsi responden terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia
yang ada di SKPD responden

No	Pernyataan	F %	SS	S	KS	TS	STS	Rata-rata Skor
1	Aparatur pelaksana pengadaan berkompeten dalam menangani program/ kegiatan.	F	17	42	5	-	-	4.18
		%	26.6	65.6	7.8	-	-	
2	Kekhawatiran pejabat pengadaan akibat pemberitaan penangkapan dengan tuduhan korupsi.	F	-	34	30	-	-	3.53
		%	-	53.1	46.9	-	-	
3	Rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan maupun jabatan lainnya.	F	-	28	36	-	-	3.43
		%	-	43.8	56.3	-	-	
4	Keengganan menjadi pejabat pengadaan karena adanya keseimbangan resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima.	F	-	24	38	2	-	3.34
		%	-	37.5	59.4	3.1	-	
5	SKPD responden terjadi mutasi pejabat/pegawai pengelola keuangan	F	1	14	47	2	-	3.21
		%	1.6	21.9	73.4	3.1	-	

Sumber: Rekapitulasi Jawaban Responden, 2021

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap kompetensi sumber daya manusia yang dijalankan di SKPD responden paling tinggi adalah tentang Aparatur pelaksana pengadaan berkompeten dalam menangani program/ kegiatan dengan rata-rata sebesar 4,18. Sedangkan, responden paling rendah adalah tentang SKPD responden

terjadi mutasi pejabat/pegawai pengelola keuangan dengan rata-rata sebesar 3,21.

1.1.3.4 Variabel Dokumen Pengadaan (X4)

Dari hasil kuisioner diperoleh gambaran mengenai variabel penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8
Persepsi responden terhadap pelaksanaan proses penyusunan dokumen keuangan yang dijalankan di SKPD responden

No	Pernyataan	F %	SS	S	KS	TS	STS	Rata-rata Skor
1	Dokumen kontrak yang belum ditandatangani karena terdapat berbagai permasalahan seperti masih menunggu persetujuan tender.	F	26	33	5	-	-	4.32
		%	40.6	51.6	7.8	-	-	
2	Berkas SPJ lengkap saat pengajuan GU/TU.	F	28	35	1	-	-	4.42
		%	43.8	54.7	1.6	-	-	
3	Berkas pengadaan kontrak dan lengkap saat pengajuan LS.	F	26	36	2	-	-	4.37
		%	40.6	56.3	3.1	-	-	
4	Gagal bayar akibat salah dalam penentuan kode rekening dalam dokumen pengadaan	F	32	30	2	-	-	4.46
		%	50	46.9	3.1	-	-	

Sumber: Rekapitulasi Jawaban Responden, 2021

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap pelaksanaan proses penyusunan dokumen yang dijalankan di SKPD responden paling tinggi adalah tentang Gagal bayar akibat salah dalam penentuan kode rekening dalam dokumen pengadaan dengan rata-rata sebesar 4,46. Sedangkan responden paling rendah adalah tentang

Dokumen kontrak yang belum ditandatangani karena terdapat berbagai permasalahan seperti masih menunggu persetujuan tender dengan rata-rata sebesar 4,32.

1.1.3.5 Variabel Ganti Uang Persediaan (X5)

Dari hasil kuisioner diperoleh gambaran mengenai variabel penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Persepsi responden terhadap proses pengajuan Ganti Uang Persediaan di SKPD responden

No	Pernyataan	F %	SS	S	KS	T S	STS	Rata-rata Skor
1	Kegiatan sudah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tapi belum diganti dengan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP).	F	30	33	1	-	-	4.45
		%	46.9	51.6	1.6	-	-	
2	Pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar.	F	18	45	1	-	-	4.26
		%	28.1	70.3	1.6	-	-	
3	UP digunakan sesuai peruntukannya.	F	27	28	9	-	-	4.28
		%	42.2	43.8	14.1	-	-	
4	Pengajuan UP tidak sesuai jadwal.	F	27	36	1	-	-	4.40
		%	42.2	56.3	1.6	-	-	

Sumber: Rekapitulasi Jawaban Responden, 2021

Berdasarkan tabel 4.9 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap proses pengajuan ganti uang persediaan yang dijalankan di SKPD responden paling tinggi adalah tentang Kegiatan sudah dilaksanakan

dengan Uang Persediaan (UP) tapi belum diganti dengan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GUP) dengan rata-rata sebesar 4,45. Sedangkan responden paling rendah adalah tentang Pengeajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar dengan rata-rata sebesar 4,26.

1.1.3.6 Variabel Penyerapan Anggaran (Y)

Dari hasil kuisioner diperoleh gambaran mengenai variabel penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut:

Tabel 4.10
Persepsi responden terhadap penyerapan anggaran di SKPD responden

No	Pernyataan	F %	SS	S	KS	TS	STS	Rata-rata Skor
1	Penyerapan anggaran pernah mencapai 100% dari pagu anggaran.	F	45	19	-	-	-	4.70
		%	70.3	29.7	-	-	-	
2	Tingkat penyerapan anggaran naik dari tahun sebelumnya.	F	41	23	-	-	-	4.64
		%	64.1	35.9	-	-	-	
3	Persentase penyerapan (realisasi) anggaran Belanja Operasional selalu di atas 90%.	F	9	51	4	-	-	4.07
		%	14.1	79.7	6.3	-	-	
4	Persentase penyerapan (realisasi) anggaran Belanja Modal selalu diatas 90%.	F	30	34	-	-	-	4.46
		%	46.9	53.1	-	-	-	
5	Persentase penyerapan anggaran belanja operasional lebih tinggi dari belanja modal.	F	27	37	-	-	-	4.42
		%	42.2	57.8	-	-	-	

Sumber: Rekapitulasi Jawaban Responden, 2021

Berdasarkan tabel 4.10 di atas dapat dilihat persepsi responden terhadap penyerapan anggaran yang dijalankan di SKPD responden paling tinggi adalah tentang Penyerapan (realisasi) anggaran pernah mencapai 100% dari pagu anggaran besar dengan rata-rata sebesar 4,70. Sedangkan responden paling rendah adalah tentang Persentase penyerapan (realisasi) anggaran Belanja Operasional selalu di atas 90% dengan rata-rata sebesar 4,07.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1 Uji Asumsi Klasik

4.2.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk melihat normal tidaknya data yang akan dianalisis. Model regresi yang baik hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji Kolmogorov- Smirnov untuk menentukan normalitas distribusi residual. Jika sig atau *p-value* > 0,05 maka data berdistribusi normal (Ghozali,2013).

Tabel 4.11
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		64
Normal Parameters ^{sa,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98622828
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	-.051
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 4.11 di atas dapat dilihat uji statistik normalitas menggunakan 1 *Sample*-KS menunjukkan nilai *Asymp. sig, (2-tailed)* > α (0,200 > 0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui uji statistik terbukti data residual terdistribusi normal.

4.2.1.2 Uji Multikolinieritas

Tabel 4.12
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X1_Pencanaan	769	1.301
X2_Administrasi	958	1.044
X3_Kompetensi SDM	677	1.478
X4_Dokumen	841	1.189
X5_GU	885	1.130

a. Dependent Variable: Y_Penyerapan

Hasil uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel 4.12, nilai yang dipakai untuk menunjukkan tidak terjadinya multikoleniaritas adalah nilai

tolerance harus $\geq 0,1$ atau sama dengan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel ≤ 10 . Dapat disimpulkan bahwa pada model tidak terjadi masalah multikolinieritas.

4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.13
Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	sig
	B	Std.Error	Beta		
	1 (Constant)	2.528	1.380		
X1_Perencanaan	-.003	.050	-.009	-.061	.951
X2_Administrasi	-.044	.050	-.111	-.888	.378
X3_Komp SDM	-.089	.056	-.237	-1.590	.117
X4_Dokumen	.084	.044	.255	1.912	.061
X5_GU	-.050	.046	-.142	-1.092	.280

a. Dependent Variable: Abs_res1

Berdasarkan pada tabel 4.13, hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan *uji Glejser* diperoleh nilai sig dari masing-masing variable independen lebih besar dari ($>$) tingkat kepercayaan (α) sebesar 0,05.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam model regresi tidak ada gejala heteroskedastisitas.

4.2.2 Hasil Regresi Linier Berganda

Regresi linier adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu buah variabel, regresi linier berganda dengan beberapa variabel bebas dan satu variabel terkait. Regresi Linier Berganda dilakukan melalui, koefisien determinasi (R^2), uji statistik F, dan uji statistik t.

Tabel 4.14
Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients ^a			t	Sig
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	1.045	2.258		.463	.645
	X1_Pencanaan	.190	.082	.182	2.322	.024
	X2_Administrasi	.043	.081	.037	.525	.602
	X3_Komp SDM	.711	.092	.647	7.742	.000
	X4_Dokumen	.063	.072	.065	.874	.386
	X5_GU	.200	.075	.194	2.656	.010

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diformulasikan dalam bentuk persamaan regresi berikut ini :

$$Y = 1,045 + 0,190 \cdot X_1 + 0,43 \cdot X_2 + 0,711 \cdot X_3 + 0,063 \cdot X_4 + 0,200 \cdot X_5$$

Dari persamaan regresi linier di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Konstanta (a).

Konstanta bernilai positif pada seluruh variabel, hal ini menandakan bahwa persamaan regresi berganda tersebut memiliki hubungan yang searah, artinya penyerapan anggaran akan meningkat seiring dengan meningkatnya perencanaan (X_1), administrasi (X_2), kompetensi SDM (X_3), dokumen (X_4), dan pengajuan GU (X_5). Nilai konstanta bernilai 1,045 berarti jika variabel independen dalam model bernilai nol, penyerapan anggaran dapat terjadi sebesar nilai konstanta.

2. Perencanaan (X_1) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y).

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,024 yang lebih kecil dari ($<$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin

meningkatnya perencanaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya perencanaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

3. Administrasi (X_2) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y).

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,602 yang lebih besar dari ($>$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel administrasi tidak berpengaruh dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya administrasi maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya kualitas administrasi maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran sebesar.

4. Kompetensi SDM (X_3) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y).

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kompetensi sumber daya manusia sebesar maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran sebesar. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

5. Dokumen Pengadaan (X_4) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y).

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,386 yang lebih besar dari ($>$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel dokumen pengadaan tidak berpengaruh dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kualitas dokumen pengadaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya nilai dokumen pengadaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

6. Ganti Uang Persediaan (X_5) terhadap tingkat penyerapan anggaran (Y).

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,010 yang lebih kecil dari ($<$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya proses pengajuan ganti uang persediaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya proses pengajuan ganti uang persediaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

4.2.2.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.15
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.852 ^a	.726	.703	1.028

a. Predictors: (Constant), X5_GU, X4_Dokumen, X2_Administrasi, X1_Perencanaan, X3_kompetensi SDM

b. Dependent Variable: Y_Penyerapan

Sumber : Hasil Penelitian, 2021 (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4.15 diketahui nilai *R Square* sebesar 0,726 hal ini menunjukkan variabel perencanaan, administrasi, kompetensi sumber daya manusia, dokumen, ganti uang persediaan, sebagai variabel independen memiliki hubungan yang kuat sebesar 72,6 % dengan variabel penyerapan anggaran sebagai variable dependen, Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,703 berarti variabel kemampuan penyerapan anggaran sebagai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variable perencanaan, administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan, GU sebesar 70,3%, sedangkan sisanya 29,7% dapat dijelaskan oleh variabel lainnya di luar penelitian ini.

4.2.2.2 Uji Statistik F

Tabel 4.16
Uji Statistik F
ANOVA_a

	Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	162.473	5	32.495	30.757	.000 _b
	Residual	61.277	58	1.056		
	Total	223.750	63			

a. Dependent Variable: Y_Penyerapan

b. Predictors: (Constant), X5_GU, X4_Dokumen, X2_Administrasi, X1_Perencanaan, X3_kompetensi SDM

Sumber : Hasil Penelitian, 2021 (Data Diolah)

Kriteria pengambilan keputusan menggunakan nilai signifikansi F hitung pada taraf nyata 5 %, Dari tabel 4.16, diperoleh nilai F adalah 30.757 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ sehingga dapat disimpulkan secara simultan variable perencanaan, administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan, GU berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran.

4.2.2.3 Uji Statistik t

Tabel 4.17
Uji Statistik t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
	B	Std.Error	Beta		
	X1_Perencanaan	.190	.082		
X2_Administrasi	.043	.081	.037	.525	.602
X3_Komp SDM	.711	.092	.647	7.742	.000
X4_Dokumen	.063	.072	.065	.874	.386
X5_GUP	.200	.075	.194	2.656	.010

a. Dependent Variable: Y_Penyerapan

Berdasarkan tabel 4.16 dapat diambil nilai t hitung dan nilai signifikansi sebesar Perencanaan (2.322 - 024), Administrasi (525 – 602), Kompetensi SDM (7.742 – 000), Dokumen Pengadaan (874 – 386), dan Ganti Uang Persediaan (2.656 – 010). sehingga dapat disimpulkan secara simultan variable perencanaan, administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan, GU berpengaruh signifikan terhadap variabel penyerapan anggaran.

4.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan menjawab rumusan masalah tentang apakah perencanaan, administrasi, kompetensi SDM, dokumen pengadaan, dan GUP secara simultandan parsial berpengaruh terhadap kemampuan penyerapan anggaran.

Tabel 4.18
Hasil Pengujian Hipotesis

Independen	→	Dependen	T Statistik	Sig	Kesimpulan
Perencanaan (X1)	→	Penyerapan Anggaran	2.322	0.024	Diterima
Administrasi (X2)	→	Penyerapan Anggaran	0.525	0.602	Ditolak

Kompetensi SDM (X3)	→	Penyerapan Anggaran	7.742	0.000	Diterima
Dokumen Pengadaan (X4)	→	Penyerapan Anggaran	0.874	0.386	Ditolak
GUP (X5)	→	Penyerapan Anggaran	2.656	0.010	Diterima

Berdasarkan hasil hipotesisnya pada table 4.17, variabel perencanaan, kompetensi SDM, dan pengajuan GUP berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan. Administrasi dan dokumen pengadaan tidak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan. Kompetensi SDM merupakan variabel dominan dalam mempengaruhi penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.

4.2.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.4.1 Pengaruh perencanaan terhadap penyerapan anggaran

Hasil pengujian pengaruh variabel perencanaan terhadap variabel penyerapan anggaran dalam penelitian ini menunjukkan nilai positif dan nilai signifikan sebesar 0,024 yang lebih kecil dari ($<$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan berpengaruh positif pada penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perencanaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya perencanaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi jawaban responden untuk variabel perencanaan menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa bahwa penyusunan anggaran masih dilaksanakan tanpa melakukan evaluasi terlebih dahulu, masih terdapat program yang diajukan tidak sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi, masih terdapat program yang dilaksanakan tanpa memperhitungkan kelayakan komposisi belanja, masih program yang belum mendapat persetujuan dari DPRD sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan mempengaruhi adanya revisi pengeluaran anggaran, dimana adanya revisi DPA karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat menunda realisasi anggaran sehingga berdampak pada penyerapan anggaran. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar dalam pelaksanaan proram kegiatan yang telah disusun tidak menemui hambatan sehingga penyerapan anggaran akan berjalan tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Purtanto (2015) menyatakan bahwa faktor perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Herriyanto (2012) yang menyatakan bahwa perencanaan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

4.2.4.2 Pengaruh administrasi terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,602 yang lebih besar dari ($>$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variable administrasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan

mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya administrasi maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya perencanaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi persepsi responden terhadap variabel administrasi rata-rata responden merasa proses administrasi yang dilaksanakan di SKPD masing-masing belum berjalan baik. Hal ini ditunjukkan dari jawaban responden yang menyatakan bahwa masih terjadi kesalahan dalam penentuan akun program kegiatan, masa penyusunan dan penelaahan anggaran yang terlalu singkat, verifikasi yang terlalu lama dari PPKAD/BUD, SK Panitia Lelang terlambat ditetapkan. Berbagai permasalahan ini tentu berdampak terhadap pelaksanaan program kegiatan di SKPD responden.

Hal ini sejalan dengan penelitian Priatno dan Khusaini (2013) yang menyatakan bahwa faktor administrasi mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja. Penelitian Herriyanto (2012) juga menyatakan bahwa faktor administrasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

4.2.4.3 Pengaruh Kompetensi SDM terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi positif dan nilai signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan

signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi persepsi responden terhadap variabel kompetensi SDM mayoritas responden menyatakan bahwa aparatur pelaksana pengadaan kurang berkompeten dalam menangani program/kegiatan, adanya kekhawatiran Pejabat Pengadaan akibat pemberitaan penangkapan dengan tuduhan korupsi, responden menyatakan kurang setuju bahwa adanya rangkap tugas dalam jabatan panitia pengadaan maupun jabatan lainnya, responden menyatakan kurang setuju bahwa adanya keengganan menjadi pejabat pengadaan karena tidak adanya keseimbangan resiko pekerjaan dengan imbalan yang diterima, responden menyatakan kurang setuju jika sering terjadi mutasi Pejabat/Pegawai Pengelola Keuangan. Dari tabulasi kuisioner mengenai latar belakang pendidikan, mayoritas PPK dan bendahara SKPD yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yaitu hanya 4 orang dari 64 responden seluruh SKPD di Kota Medan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kaharuddin (2012) yang menyatakan bahwa faktor kapasitas sumber daya manusia berperan mempengaruhi penyerapan belanja Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan di Kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010. Arif dan Halim (2013) juga menyatakan hal yang sama bahwa faktor kapasitas sumber

daya manusia merupakan salah satu faktor yang paling mendominasi terjadinya minimnya penyerapan APBD tahun 2011. Sedangkan dalam penelitian Purtanto (2015) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah.

4.2.4.4 Pengaruh dokumen pengadaan terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi dan nilai signifikan sebesar 0,386 yang lebih besar dari ($>$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variabel dokumen pengadaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya nilai dokumen pengadaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya nilai dokumen pengadaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi persepsi responden pada variabel dokumen pengadaan mayoritas responden menyatakan masih adanya dokumen kontrak yang belum ditandatangani karena terdapat berbagai permasalahan seperti masih menunggu persetujuan tender, adanya berkas SPJ tidak lengkap saat pengajuan GU/TU, adanya berkas Pengadaan Kontrak dan Lelang tidak lengkap saat pengajuan LS, masih adanya terjadi gagal bayar akibat salah dalam penentuan kode rekening dalam dokumen pengadaan, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden merasa proses penataan

dokumen pengadaan yang dilaksanakan di SKPD masing-masing belum berjalan baik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Herriyanto (2012) yang menyatakan faktor dokumen pengadaan berpengaruh positif mempengaruhi keterlambatan penyerapan anggaran belanja pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. Penelitian yang dilakukan Priatno dan Khusaini (2013) juga menyatakan bahwa faktor pengadaan barang dan jasa yang mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan anggaran satuan kerja.

4.2.4.5 Pengaruh ganti uang persediaan terhadap penyerapan anggaran

Berdasarkan nilai koefisien regresi positif dan nilai signifikan sebesar 0,010 yang lebih kecil dari ($<$) $\alpha = 0,05$ dapat disimpulkan bahwa variable ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi penyerapan anggaran. Berpengaruh positif menunjukkan bahwa semakin meningkatnya proses pengajuan ganti uang persediaan maka akan semakin meningkat pula penyerapan anggaran. Demikian juga sebaliknya semakin menurunnya proses pengajuan ganti uang persediaan maka akan semakin menurun pula penyerapan anggaran.

Berdasarkan tabulasi kuisioner, mayoritas responden menyatakan bahwa masih terjadi kegiatan telah dilaksanakan dengan Uang Persediaan (UP) tapi belum diganti dengan pengajuan Ganti Uang Persediaan (GU), responden juga menyatakan bahwa adanya pengajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan

perkantoran memerlukan dana yang cukup besar, responden juga menyatakan bahwa masih terjadi Up tidak digunakan sesuai peruntukannya, responden juga menyatakan masih terjadi pengajuan UP tidak sesuai jadwal. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden merasa proses pelaksanaan pengajuan ganti uang persediaan (GU) yang dilaksanakan di SKPD masing-masing masih belum berjalan maksimal.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Herriyanto (2012) yang menyatakan bahwa ganti uang persediaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisa data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan.
2. Administrasi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan.
4. Dokumen pengadaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran SKPD di Kota Medan.
5. Ganti uang persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Medan.

5.2 Saran

1. Pada perencanaan dapat meningkatkan kualitas perencanaan penyusunan anggaran pada program yang diajukan sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan organisasi
2. Pada administrasi dapat meningkatkan kualitas proses administrasi pada SK panitia yang cepat ditetapkan

3. Pada kompetensi sumber daya manusia dapat meningkatkan kualitas kompetensi sumber daya manusia pada SKPD responden terjadi mutasi pejabat/pegawai pengelola keuangan.
4. Pada dokumen pengadaan dapat meningkatkan kualitas proses penyusunan dokumen pengadaan pada Dokumen kontrak yang belum ditandatangani karena terdapat berbagai permasalahan seperti masih menunggu persetujuan tender.
5. Pada ganti uang persediaan dapat meningkatkan kualitas proses pengajuan ganti uang persediaan pada Pengeajuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebanyak 2 kali pengajuan dikarenakan kebutuhan perkantoran memerlukan dana yang cukup besar.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan hanya pada satu kota di Sumatera Utara, yaitu SKPD yang ada di Kota Medan sehingga menjadi keterbatasan karena hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke tingkat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini juga menggunakan metode linier berganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Jhon Andra Asmara. 2006. *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Akutansi Keuangan Daerah*.2008. Jakarta.PT. Indeks.
- Allison dan Kaye.2005. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. ISBN: 9789794614488. *Yayasan Obor Indonesia*.
- Amir, Hidayat.2013. *Penguatan Hubungan Ekonomi dan Keuangan Internasional dalam Mendukung Pembangunan Nasional*. PT. Nagakusuma Media Kreatif. Jakarta.
- Andi, 2003. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta.
- Andi, 2009. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta.Andi
- Anessi-Pessina, Eugenio, Maria francesca Sicilia & Ileana Steccolini. 2012. *Budgeting and Rebudgeting in Local Governments: A Siamese Twins? Public Administration Review*72(6): 875-884.
- Arif, Emkhad, dan Abdul Halim.2013. *Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2011*. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado, 25-28 September 2013. *Jurnal dan Prosiding SNA Vol. 16.Tahun 2013*
- Asmarani, Tias. 2013. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pengelolaan Kas dan Pelaporan, Terhadap Kinerja Kepala SKPD (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Pematang Siantar)*. *Tesis*. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Astuty Widia, 2019. Pengaruh Lingkungan Bisnis terhadap Informasi Akuntansi Manajemen dan Penganggaran Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan. Kumpulan jurnal dosen universitas muhammadiyah sumatera utara.

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).2011. Menyoal Penyerapan Anggaran. *Majalah Perwakilan BPKP Provinsi D.I Yogyakarta, Edisi Desember 2011 tahun III/No 6 ISSN 2088-2890.*
- Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi 1.* BPFE UGM, Yogyakarta.
- Biro Keuangan Pemrov Sumut <http://www.sumutprov.go.id/berita-lainnya/503-realisasi-apbd-sumut-masih-60-persen>, diakses pada 12 november 2015 pukul 11.06).
- Cornia, Gary C., Ray D. Nelson & Andrea Wilko.2004. *Fiscal Planning, Budgeting, and Rebudgeting Using Revenue Semaphores. Public Administration Review 64(2): 164-179.*
- Darise, Nurlan.2007. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).* Jakarta: PT. Indeks.
- Daulay Raihanah, 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah di Kota Medan. Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan
- Defisit dan Surplus dalam Anggaran Daerah:, 2013 Apakah Saling Berhubungan?* Januari 1.Web link: [http://syukriy.wordpress.com/2013/01/01/defisit-dan-surplus-dalamanggaran-daerah-apakah-saling-berhubungan/\(9/11/2014\)](http://syukriy.wordpress.com/2013/01/01/defisit-dan-surplus-dalamanggaran-daerah-apakah-saling-berhubungan/(9/11/2014))
- Erlina.2011. *Metodologi Penelitian Bisnis.* Medan:Usu Press.
- Fitriany, Nur.2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun (studi di Kota Pekalongan tahun 2013). *Tesis.* Semarang: Universitas stikubank. <http://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/pasca1/article/view/2493>
- Forrester, John P & Daniel R. Mullins.1992. *Rebudgeting: The Serial Nature of Municipal Budgetary Processes. Public Administration Review 52(5): 467- 473.*
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 20. Edisi 6.* Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herriyanto, Hendris.2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja

- Kementerian/Lembaga di Wilayah Jakarta. *Tesis*. Jakarta: Fakultas Ekonomi.Universitas Indonesia.
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/08/24/16095331/Ini.5.Provinsi.yang.Penyerapan.Anggarannya.Sangat.Renda>
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Akuntansi dan Manajemen, Edisi Pertama*. BPFE. Yogyakarta.
- Kaharuddin. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Daerah di Kabupaten Sumbawa (Studi Kasus: Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang pendidikan 2010). *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Pembangunan. Universitas Gajah Mada.
- Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kuswoyo, Iwan Dwi. 2012. Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran. *Tesis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Gadjah Mada.
- Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2015
- Malahayati, Cut, Islahuddin, Hasan Basri.2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Serapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi, Volume 4, No. 1, februari 2015, ISSN 2302-0199 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 9 Pages pp. 11- 19.*
- Mardiasmo. 2000. *Otonomi Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik National Seminar Promotting Good Governance 1999.*
- Miliasih, Retno.2012. Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru. *Tesis*. Jakarta.Fakultas Ekonomi.Universitas Indonesia.
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, Yogyakarta : STIE YKPN.

- Munandar, M. 2000. *Budgeting: Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta.BPFE Yogyakarta
- Nawawi, Hadari H.2002. *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Nurmala Sari Eka, 2017. Akuntansi Sektor Publik. Medan: Perdana Publishing
- Pengawasan, Pengendalian, Dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. 2001. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol 3, No.2 :441-456.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara.
- Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. 2007. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. Vol 2, No.1 :1-17.
- Priatno, Prasetya Adi dan M. Khusaini.2013. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Blitar*.Artikel Ilmiah. Malang.Universitas Brawijaya.Web link: <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/viewFile/603/546>.
- Purtanto .2015.Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa (Studi atas Persepsi pada Pegawai Bersertifikat Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Tegal). *Masters Thesis*, Universitas Sebelas Maret. <http://eprints.uns.ac.id/id/eprint/19541>.
- Rahayu, Sri Lestari dan Adrianus Dwi Siswanto.2011. *Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penyerapan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2010*. <http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/edef-konten-view.asp?id=20100920095054911292040>.
- Ramadhaniatun Nazry.2014. *Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah*. Makalah dipresentasikan pada Konferensi Nasional Akuntansi I,

- Ikatan Akuntansi Indonesia pada tanggal 26-28 Februari. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Romaidon Darma, & Hasan Basri. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Serapan Anggaran Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh). *Tesis*. Aceh: Universitas Syah Kuala.
- Rudianto. 2009. *Penganggaran Konsep dan Teknik Penyusunan Anggaran*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Sari Maya, 2018. The influence of organization's culture and internal control to corporate governance and its impact on BUMN (state-owned enterprises) corporate performance in Indonesia. J. Advanced Res. L. & Econ.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods For Business : A Skill Building Approach. 4th Edition*. John Willey & Sons, Inc. New York.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Simanjuntak, Herry B, 2005, " *Jiwasraya Magazine* ". Edisi November.
- Sinambale Elizar dkk, 2016. Analisis Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.
- Sriharioto. 2012. Good Governance, Kompetensi KPPN dan Persepsi Keberhasilan Pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja Kementerian/Lembaga. *Tesis*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung. Penerbit Alfabeta.
- Suhartono. 2011. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara (Solusi Penyerapan Anggaran Belanja Negara yang Efisien, Efektif dan Akuntabel). *Tesis*. Jakarta. Universitas Indonesia.

Sukadi. 2012. Faktor-faktor yang Menyebabkan Penumpukan Penyerapan Anggaran Belanja pada Akhir Tahun Anggaran. *Tesis*. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada.

Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

www.djkd.depkeu.go.id

www.Medan.go.id

www.wikipedia.com

Yuhertiana. 2003. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Edisi 1*. BPFE UGM, Yogyakarta.

LAMPIRAN

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

Variabel Perencanaan (X₁)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.803	.797	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan_1	15.73	7.582	.513	.453	.788
Pertanyaan_2	15.63	6.378	.782	.703	.700
Pertanyaan_3	15.70	6.493	.720	.726	.721
Pertanyaan_4	15.53	6.809	.676	.658	.737
Pertanyaan_5	15.40	8.800	.272	.287	.850

Variabel Administrasi (X₂)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.780	.793	5

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan_1	13.27	2.754	.799	.	.656
Pertanyaan_2	13.50	3.017	.613	.	.720
Pertanyaan_3	13.33	2.920	.698	.	.692
Pertanyaan_4	13.27	2.754	.799	.	.656
Pertanyaan_5	13.70	4.079	.043	.	.902

Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₃)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.864	.868	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan_1	14.42	4.494	.778	.669	.814
Pertanyaan_2	14.48	4.254	.711	.969	.829
Pertanyaan_3	14.58	4.525	.587	.529	.862
Pertanyaan_4	14.50	4.315	.715	.970	.827
Pertanyaan_5	14.38	4.885	.663	.647	.843

Variabel Dokumen Pengadaan (X₄)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.720	.725	5

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan_1	13.70	4.217	.533	.516	.650
Pertanyaan_2	13.43	4.737	.440	.314	.688
Pertanyaan_3	13.60	4.179	.569	.496	.637
Pertanyaan_4	13.57	3.978	.582	.698	.628
Pertanyaan_5	13.43	4.599	.304	.377	.748

Variabel Ganti Uang Persediaan (X₅)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.712	.713	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan_1	14.30	3.872	.460	.662	.668
Pertanyaan_2	14.13	3.706	.600	.929	.611
Pertanyaan_3	14.33	4.575	.285	.623	.728
Pertanyaan_4	14.07	3.720	.438	.391	.681
Pertanyaan_5	14.10	3.748	.589	.931	.617

Variabel Penyerapan Anggaran (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.811	.811	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Pertanyaan_1	14.67	6.506	.534	.	.794
Pertanyaan_2	14.47	6.464	.618	.	.768
Pertanyaan_3	14.60	6.731	.517	.	.798
Pertanyaan_4	14.47	5.982	.711	.	.738
Pertanyaan_5	14.47	6.464	.618	.	.768

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.98346851
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.076
	Negative	-.066
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1_Perencanaan	.769	1.301
	X2_Administrasi	.958	1.044
	X3_Komp SDM	.677	1.478
	X4_Dokumen	.841	1.189
	X5_GU	.885	1.130

a. Dependent Variable: Y_Penyerapan

Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.528	1.380		1.832	.072
	X1_Perencanaan	-.003	.050	-.009	-.061	.951
	X2_Administrasi	-.044	.050	-.111	-.888	.378
	X3_Komp SDM	-.089	.056	-.237	-1.590	.117
	X4_Dokumen	.084	.044	.255	1.912	.061
	X5_GU	-.050	.046	-.142	-1.092	.280

a. Dependent Variable: Abs_res1

Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.045	2.258		.463	.645
	X1_Perencanaan	.190	.082	.182	2.322	.024
	X2_Administrasi	.043	.081	.037	.525	.602
	X3_Komp SDM	.711	.092	.647	7.742	.000
	X4_Dokumen	.063	.072	.065	.874	.386
	X5_GU	.200	.075	.194	2.656	.010

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.852 ^a	.726	.703	1.028

a. Predictors: (Constant), X5_GU, X4_Dokumen, X2_Administrasi, X1_Perencanaan, X3_Komp SDM

b. Dependent Variable: Y_Penyerapan

Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	162.473	5	32.495	30.757	.000 ^b
	Residual	61.277	58	1.056		
	Total	223.750	63			

a. Dependent Variable: Y_Penyerapan

b. Predictors: (Constant), X5_GU, X4_Dokumen, X2_Administrasi, X1_Perencanaan, X3_Komp SDM

Uji Statistik t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
X1_Perencanaan	.190	.082	.182	2.322	.024
X2_Administrasi	.043	.081	.037	.525	.602
X3_Komp SDM	.711	.092	.647	7.742	.000
X4_Dokumen	.063	.072	.065	.874	.386
X5_GU	.200	.075	.194	2.656	.010

a. Dependent Variable: Y_Penyerapan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Fera Afifah
NPM : 1605170224
Tempat /Tgl Lahir : Medan, 31 Maret 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Karya Gg. Cikalong No. 23 Medan
Anak Ke : 2 (Dua)
Kewarganegaraan : Indonesia
No. Hp : 085256484499
Email : fera.afifah031@gmail.com

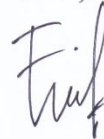
Nama Orang Tua

Ayah : Zainal Amri
Ibu : Siti Syarah S.Ag
Alamat : Jl. Karya Gg. Cikalong No. 23 Medan
No hp : 081375087333

Pendidikan Formal

1. SD Swasta PAB 27 Medan Tamat Tahun 2004-2010
2. SMP Negeri 43 Medan Tamat Tahun 2010-2013
3. SMA Negeri 1 Labuhan Deli Tamat Tahun 2013-2016
4. S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tamat Tahun 2016-2021

Medan, 18 juni 2021



FERA AFIFAH



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 1773/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/25/6/2020

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 25/6/2020

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : FERA AFIFAH
NPM : 1605170224
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Untuk Mengetahui Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Daerah di Kelurahan Karang Berombak

Rencana Judul : 1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Daerah Terhadap Anggaran Belanja Modal
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
3. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Daerah Terhadap Kinerja keuangan

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Kelurahan Karang Berombak

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(FERA AFIFAH)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA

NOMOR : 3755/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2020

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 02 September 2020

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Fera Afifah
N P M : 1605170224
Semester : IX (Sembilan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota (Kantor Walikota Medan)

Dosen Pembimbing : **Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si**

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 24 November 2021**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Rabiul Akhir 1442 H
24 November 2020 M



Dekan

H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor – II UMSU Medan.
2. Peringgal.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini, agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 3753/IL3-AU/UMSU-05/F/2020
Lampiran :
Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Medan, 08 Rabiul Akhir 1442 H
24 November 2020 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Kantor Walikota Medan
Jln. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Fera Afifah
Npm : 1605170224
Program Studi : Akuntansi
Semester : IX (Sembilan)
Judul Skripsi : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota (Kantor Walikota Medan)

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan



H. Januri, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Wakil Rektor II UMSU Medan
2. Peninggal



PEMERINTAH KOTA MEDAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan Kode Pos 20112

Telepon. (061) 4555693 Faks. (061) 4555693

E-mail : balitbangmedan@yahoo.co.id. Website : balitbang.pemkmedan.go.id

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/1523/Balitbang/2020

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 57 Tahun 2001, Tanggal 13 November 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor : 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan setelah membaca / memperhatikan surat Dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 3753/II.3-AU/UMSU-05/F/2020 Tanggal : 24 November 2020 Hal : Izin Riset Pendahuluan.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : Fera Afifah.
NIM : 1605170224.
Jurusan/Prodi : Akuntansi.
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis.
Lokasi : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
Judul : "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota (Kantor Walikota Medan)".
Lamanya : 1 (satu) minggu.
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.
4. Hasil penelitian diserahkan kepada Kepala Balitbang Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah penelitian dalam bentuk Soft Copy.
5. Surat rekomendasi penelitian dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat rekomendasi penelitian ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : M e d a n.

Pada Tanggal : 26 November 2020

An Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,



Tembusan :

1. Walikota Medan, (sebagai laporan).
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos-20112
Telepon. (061) 4512412 Faks. (061) 4579228, Website : pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 18 /B.AP/BPKAD/XII/2020

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i sebagai berikut :

Nama : **FERA AFIFAH**
NIM : **1605170224**
Universitas/Fakultas : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA / EKONOMI DAN BISNIS**
Jurusan/Prog.Studi : **AKUNTANSI/ S-1**

Telah selesai melaksanakan penelitian/riset di **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan** pada *Bidang Akuntansi* dari tanggal 03 Desember 2020 s.d tanggal 16 Desember 2020

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya.

Medan, 18 Desember 2020 .

a.n. **Kepala BPKAD Kota Medan**
Kabid. Akuntansi,



Drs. Muhammad Ashari Lubis, SE, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 19680505 198909 1 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : FERA AFIFAH
NPM : 1605170224
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmalia Sari, SE, M.Si
Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Latar belakang : Fenomena belum jelas	30 September 2020	
Bab 2	Masukkan teori secara rinci, Kerangka konseptual belum dijelaskan secara rinci keterangannya. Tambahkan teori lebih banyak dan rinci lagi faktor apa saja yang mempengaruhi, Buat definisinya, manfaat / tujuan, pentingnya, dan indikator / karakteristiknya Perbaiki kerangka konseptual, kalimatnya pengaruh atau hubungan?, Hipotesis tidak perlu dibuat symbol H1,	30 September 2020 19 Oktober 2020 5 November 2020	
Bab 3	Perbaiki pendekatan penelitian, Buat table untuk definisi operasional variable, Buat jumlah populasi dan sampel, juga cantumkan nama-nama SKPD nya	30 September 2020	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

	Perbaiki sampel, kok 12 orang? Berapa banyak SKPD nya?	5 November 2020	
Daftar Pustaka	Daftar pustaka, sitasi dosen umsu, minimal 5 orang	5 November 2020	
Peretujuan Seminar Proposal	Ace proposal lanjut ke seminar proposal	16/11 2020	

Medan, 16 - Nov - 2020

Pembimbing

Diketahui/ Disetujui Ketua Prodi

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si)

(Fitriani Saragih, SE., M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Sabtu, 16 Januari 2021* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Fera Afifah*
NPM. : 1605170224
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 31 Maret 1998
Alamat Rumah : Jln. Karya Gg. Cikalong No. 23B Medan
Judul Proposal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
<i>Judul</i>	-
Bab I	Masalah Penelitiannya belum jelas dan identifikasi masalahnya juga tidak ada Di rumusan masalah, Lengkapi dengan Objek Penelitian
Bab II	Lihat dan sesuaikan dengan pedoman skripsi yang baru Berikan penjelasan pada kerangka berfikir konseptual Tidak perlu pakai seperti H1
Bab III	Lihat pedoman skripsi yang baru Buat table waktu penelitian
Lainnya	Perbaiki daftar pustaka
Kesimpulan	Perbaikan Minor Perbaikan Mayor

Medan, *16 Januari 2021*

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si

Pembanding

Elizar Sinambela, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Sabtu*, 16 Januari 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Fera Afifah
NPM : 1605170224
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 31 Maret 1998
Alamat Rumah : Jln. Karya Gg. Cicalong No. 23B Medan
Judul Proposal : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si

Medan, 16 Januari 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Fitriani Saragih, SE, M.Si

Sekretaris

Zulia Hanum, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si

Pembanding

Elizar Sinambela, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan

Ade Gunawan, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

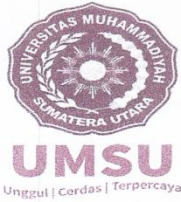
Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FERA AFIFAH
NPM : 1605170224
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, AK, CA
Judul Penelitian : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Medan.

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 2	Kerangka konseptual di perbaiki gambarnya	29 / 03 / 2021	
Bab 3	Hasil Validitas & Reliabilitas dibuat di bab 3	29 / 03 / 2021	
Bab 4	Buat mean / rata-rata skor jawaban dari responden di setiap variabel	29 / 03 / 2021	
Bab 4	Hasil penelitian, uji hipotesis perbaiki, pembahasan disesuaikan	01 / 04 / 2021	
Bab 5	Kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah, saran diperbaiki	01 / 04 / 2021	
Daftar pustaka	Perhatikan daftar pustaka	01 / 04 / 2021	
Bab 4	Pembahasan di eksplansi lagi yang tidak berpengaruh	07 / 04 / 2021	
Bab 5	Saran harus operasional	07 / 04 / 2021	



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

	pekerjaan logo operasi tabel. zangan keipms		3/1
	kegiatan peneliti. list, logo, sara perusaha		2/1
	see skripsi Canggih sedang mega huan	19/4 21	3/1

Medan, April 2021

Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si, AK, CA)

Diketahui/ Disetujui Ketua Prodi

(Fitriani Saragih, SE., M.Si)